

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: APBD Perubahan Naik Rp 100 M
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.6
Edisi	: Selasa, 2 Oktober 2018

APBD Perubahan Naik Rp 100 M

Kenaikan APBD Perubahan 2018 ini mendapatkan persetujuan DPRD Kota Cimahi, dan disahkan dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada Minggu (30/8) malam di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita.

Sebelum pengesahan, pihak legislatif dan eksekutif telah membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Pembahasan juga dilakukan, termasuk Raperda Perubahan APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2018.

Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna mengatakan, meski tahun anggaran 2018 tinggal tiga bulan ke depan, namun perubahan APBD 2018 tetap harus dilakukan. Di antaranya untuk peningkatan IPM, diarahkan untuk prioritas kota, diupayakan lebih baik/efisien, dan tingkat defisit terus menurun pertumbuhannya menuju anggaran berimbang. Selain itu memerhatikan efektivitas belanja langsung agar *pro-poor, growth, job, dan environment*.

"Dengan demikian ditempuhnya kebijakan perubahan belanja daerah,

bertujuan untuk mengakomodasi belanja-belanja yang belum teranggarkan ataupun memiliki tingkat kemendesaan yang tinggi," bebernya.

Ajay menjelaskan, pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,67% atau Rp 72,426 miliar dari APBD murni tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 1,278 triliun, sehingga menjadi Rp 1,350 triliun pada raperda APBD Perubahan tahun 2018.

"Belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 6,99% atau Rp 109,967 miliar dari APBD murni tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,573 triliun, sehingga menjadi Rp 1,683 triliun," tu-

turnya.

Menurut Ajay, belanja tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp 638,557 miliar yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

"Selain itu belanja langsung program dan kegiatan sebesar Rp 1.045 triliun untuk mendanai belanja yang diarahkan (*earmark*), belanja yang bersifat mengikat atau wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM (surat perintah membayar), dan belanja lainnya," terang Ajay.

Mengacu kebijakan

Ditambahkan, kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada kebijakan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2012-2017. Di antaranya mendukung program pelayanan dasar, program-program yang selaras dengan pusat dan provinsi, serta mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022.

Disebutkan, sementara selisih pendapatan dan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 yaitu sebesar minus Rp 333,386 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp 339,315 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (silpa) tahun sebelumnya yang akan dikeluarkan dalam pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp 2,429 miliar, dan penyer-taan modal sebesar Rp 3,500 miliar. "Sehingga netto pembiayaan yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran, yakni sebesar Rp 333,386 miliar," terang Ajay. (B.110)**